

PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID- 19 OLEH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANJAR

Arismayanti Lubis¹, Endah Vestikowati², Teguh Anggoro³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : arisma.insom@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan bahwa pelaksanaan program layanan elektronik perpustakaan daerah pada masa pandemi covid-19 oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar masih belum optimal hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi e-pusda oleh pegawai perpustakaan daerah Kota Banjar kepada masyarakat, kurang diperbaruinya koleksi e-book di dalam aplikasi e-pusda, serta masih sedikitnya masyarakat Kota Banjar yang menggunakan aplikasi e-pusda. Metode penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: Kurang melaksanakan dimensi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan dikarenakan adanya hambatan seperti masih kurangnya pengemabangan aplikasi e-pusda, keterbatasan anggaran yang dimiliki perpustakaan daerah Kota Banjar, dan masih dukungan pemerintah dan masyarakat. Sehingga diharapkan perpustakaan daerah Kota Banjar meningkatkan intensitas sosialisasi e-pusda kepada masyarakat beserta kerja sama dengan pemerintah atau pihak lain serta meningkatkan dukungan kemampuan pegawai dalam pelaksanaan e-pusda, mengoptimalkan anggaran yang dimiliki.

Kata Kunci : *Pelaksanaan program, Perpustakaan Daerah, e-pusda*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan ketentuan umum pasal 1 bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Layanan perpustakaan yang umumnya dimanfaatkan oleh pengunjung perpustakaan atau pemustaka diantaranya layanan sirkulasi dan referensi, biasanya diakses secara langsung dengan mendatangi gedung perpustakaan. Selain itu, program-

program yang ada di bidang perpustakaan daerah kota Banjar seperti *story telling*, program bedah buku, program wisata baca dan perpustakaan keliling tidak berjalan dengan normal dan baik dikarenakan dalam kondisi pandemi covid-19 menjadi terhambat dalam pelaksanaannya. Padahal, program unggulan yang dimiliki oleh perpustakaan Kota Banjar yaitu perpustakaan keliling. Sebagaimana yang diketahui bahwa perpustakaan keliling adalah perpustakaan bergerak (*mobile library*) yang melayani masyarakat umum tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, dan agama dengan cara mendatangi pemakai ke tempat-tempat tertentu yang dianggap strategis dengan membawa bahan

bacaan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai yang dikunjungi. (Vestikowati,2015). Oleh karena itu, perpustakaan dituntut berinovasi dalam melayani para pemustaka atau masyarakat sebagaimana kondisi normal. Salah satu bentuk inovasi yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yaitu bidang perpustakaan Kota Banjar adalah aplikasi layanan *e-pusda* Kota Banjar. Selain itu, adanya pergeseran budaya dari manual ke digital akibat kemajuan teknologi informasi sehingga hal tersebut pula menjadi permasalahan urusan wajib Non-Pelayanan dasar perpustakaan(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023).

Tabel .1
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020

BAGIAN	Jumlah Pengunjung												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
Perpustakaan Umum	43	36	44	11	5	27	33	36	55	67	76	20	453
Perpustakaan Keliling	0	4422	2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7082
Teras Baca Tanjungsukur	296	371	143	0	0	15	30	219	124	17	12	37	1267
Teras Baca Banjarkolot	254	466	161	0	0	4	2	21	5	9	0	0	922
Kolecer	5	58	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
Perpustakaan Digital	31	49	69	150	42	21	19	5	9	33	90	68	586
TOTAL												10381	

Sumber: Bagian Perpustakaan, 2020

Berdasarkan tabel. 1 dapat diketahui bahwa pengunjung paling dominan pada perpustakaan keliling. Maka keberadaan *e-pusda* ini belum mampu dalam memberikan informasi dan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Di samping itu, jika

diukur dari segi dimensi isi kebijakan di antaranya tipe manfaat, *e-pusda* belum mampu memberikan layanan manfaatnya secara maksimal, kurangnya dukungan masyarakat serta belum optimalnya sumber-sumber daya yang digunakan. Begitu pun, dengan

dimensi dari lingkungan kebijakan diantaranya masih kurangnya respon dari pelaksana terhadap keinginan masyarakat untuk program *e-pusda*. Dengan demikian pelaksanaan program *e-pusda* Kota Banjar belum berjalan dengan optimal, oleh karena itu ada beberapa kendala yang terjadi diantaranya:

1. Kurangnya sosialisasi *e-pusda* sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui sistem layanan *e-pusda* ini sebagai akses masyarakat terhadap layanan aplikasi *e-pusda* kota Banjar masih sangat minim.
2. Kurang diperbarainya buku-buku dan referensi elektronik/digital
3. Masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan aplikasi layanan *e-pusda* di tahun 2020 dibanding dengan jumlah penduduk di Kota Banjar yaitu dengan total 205.482 jiwa.
4. Masih rendahnya budaya baca masyarakat di kota Banjar

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Program Layanan Elektronik Perpustakaan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar ?.

KAJIAN PUSTAKA

Pelaksanaan Program

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2017:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai

berikut: Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Model Pelaksanaan Program

1. Van Meter dan Van Horn

Ada 6 variabel, menurut Van Meter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

2. Charles O. Jones

Terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni Organisasi, Interpretasi dan Penerapan.

3. Merilee S. Grindle

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*. *Content of Policy* menurut Grindle adalah kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan.

Context of Policy menurut Grindle adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Berdasarkan paparan model-model tersebut peneliti mengambil model pelaksanaan Merille S.Grindle. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan.

Elektronik Perpustakaan Daerah

Griffin (dalam Hartono, 2019: 29) mendefinisikan bahwa perpustakaan elektronik sebagai koleksi data multimedia dalam skala besar yang terorganisasi dengan perangkat manajemen informasi dan metode yang mampu menampilkan data sebagai informasi dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat dalam berbagai konteks organisasi dan sosial masyarakat. Sementara itu fungsi perpustakaan daerah sebagaimana termuat di dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan :”Bahwa Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota”.Berdasarkan

pemikiran tersebut maka dapat dipahami bahwa pengertian dari perpustakaan elektronik daerah adalah Perpustakaan milik daerah yang di dalamnya terdapat koleksi data, informasi, pengetahuan dan data manajemen lainnya yang berbasis elektronik atau digital dimana penggunaanya bisa mengakses aplikasi tersebut dengan mudah dan bisa dimana saja.

METODE

Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap pelaksana program yang ditunjukkan oleh pegawai perpustakaan dalam melaksanakan layanan *e-pusda* Kota Banjar. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yaitu,kepala bidang perpustakaan kota banjar,kasi layanan promosi minat & baca, pustakawan terampil, dan 7 pengguna layanan *e-pusda*. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur keberhasilan suatu pelaksanaan program, maka penulis menggunakan teori dari Merille S.Grindle yang ditentukan oleh Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan:

1. *Content of policy* (Isi Kebijakan):

a. Kepentingan–kepentingan yang mempengaruhi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perpustakaan daerah Kota Banjar kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memberikan kepentingan dukungannya untuk program layanan *e-pusda*.

Dari hasil penelitian tersebut, sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Pasal 60 ayat (d) bahwa masyarakat berkewajiban mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya. Belum sejalan antara teori dengan hasil wawancara, dimana masyarakat di Kota Banjar masih banyak yang belum mengetahui akan adanya *e-pusda* Kota Banjar sehingga kepentingan dukungan masyarakat terhadap program *e-pusda* masih belum maksimal

b. Tipe manfaat

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, diketahui bahwa Perpustakaan Daerah Kota Banjar perlu mengembangkan layanan program *e-pusda* agar masyarakat bisa sepenuhnya merasakan manfaat maksimal dari adanya program aplikasi *e-pusda* tersebut.

Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan adanya relevansi dengan teori yang dikemukakan oleh Wahyu Supriyanto (dalam Hartono, 2019:32) terkait dengan manfaat perpustakaan digital yang menjelaskan bahwa

manfaat dari perpustakaan digital antara lain seperti sebagai sumber pengetahuan, untuk menyimpan (*repository*), dan untuk perawatan/preservasi. Akan tetapi, dari hasil penelitian bertolak belakang dengan teori tersebut dimana *e-pusda* Kota Banjar tidak ada *repository* dan untuk perawatan / preservasi. Selain itu, manfaat perpustakaan digital bagi pengguna atau pemustaka dikemukakan Soleh (dalam Hartono, 2020:324) antara lain yaitu mengatasi keterbatasan waktu dan tempat, memperoleh informasi yang paling baru dengan cepat, mempermudah akses informasi dari berbagai sumber dan mempermudah untuk memindahkan dan mengubah bentuk untuk kepentingan presentasi. Dari hasil penelitian, dengan teori manfaat perpustakaan digital bagi pemustaka sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan tersebut.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Banjar tentang pelaksanaan *e-pusda* bahwa dalam pelaksanaan dimensi tersebut, diketahui indikator adanya kemudahan akses layanan *e-pusda* sudah berjalan secara optimal karena akses layanan *e-pusda* dapat diakses di mana saja dan kapan saja .

Hartono (2019:32) menyatakan bahwa akses terhadap perpustakaan elektronik tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dapat diakses dari mana dan kapan saja.

Begitu pula dengan indikator adanya pengembangan layanan *e-pusda* belum dilakukan dengan optimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang terlibatnya pustakawan digital dalam pengembangan *e-pusda*, belum adanya aspek legalitas digitalisasi serta kurangnya kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam pengembangan *e-pusda*.

Hartono (2019:37) menyatakan bahwa pengembangan perpustakaan digital perlu memperhatikan 3 aspek penting antara lain aspek organizational, aspek mekanisasi, otomatisasi dan komunikasi informasi serta aspek legalitas.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program *e-pusda* kurang berjalan optimal dengan dimensi derajat perubahan yang ingin dicapai. Dimana seharusnya dalam pengembangan *e-pusda* dibuatnya aturan digitalisasi *e-pusda*, perlunya keterlibatan langsung pustakawan digital serta perlunya bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam pengembangan *e-pusda* Kota Banjar.

d. Letak pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Banjar tentang pelaksanaan *e-pusda* bahwa dalam pelaksanaan dimensi tersebut, sudah berjalan cukup optimal, hanya saja dikarenakan *e-pusda* tersebut berasal dari pihak ketiga, maka jika ada masalah/error dalam *e-pusda* terkadang masih membutuhkan bantuan pihak ketiga tersebut.

Peraturan wali kota banjar nomor 41 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kearsipan dan perpustakaan. Sudah terdapat kesesuaian antara teori dengan hasil wawancara, dimana bidang perpustakaan Kota Banjar melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menjalankan, mengelola dan termasuk mengatasi masalah yang ada di dalam program *e-pusda* Kota Banjar.

e. Pelaksana program

Berdasarkan hasil penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Banjar tentang pelaksanaan *e-pusda* bahwa dalam pelaksanaan dimensi tersebut belum berjalan dengan baik, dikarenakan tidak adanya pustakawan digital yang lebih mumpuni dalam segi pengembangan *e-pusda* serta jarang dilakukan pelatihan atau pembinaan terkait *e-pusda* kepada para pegawai Perpustakaan Daerah Kota Banjar.

Hartono (2019:43) menyatakan bahwa apabila *hardware*, *software* sudah mendukung maka harus didukung pula dengan kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kemampuan pada bidang tertentu akan menjadi sebuah tolak ukur untuk menentukan kualitas SDM yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program *e-pusda* kurang berjalan optimal dengan dimensi derajat perubahan yang ingin dicapai. Dimana

seharusnya dalam pengembangan *e-pusda* dibuatnya aturan digitalisasi *e-pusda*, perlunya keterlibatan langsung pustakawan digital serta perlunya bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam pengembangan *e-pusda* Kota Banjar.

f. Sumber-sumber daya yang digunakan

Berdasarkan hasil penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Banjar tentang pelaksanaan *e-pusda* bahwa dalam pelaksanaan dimensi tersebut, diketahui indikator ketersediaan anggaran yang memadai kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan program *e-pusda* dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar untuk melengkapi dan mengembangkan layanan program *e-pusda*, sehingga kemajuan aplikasi perpustakaan elektronik Kota Banjar saat ini masih belum maksimal seperti dalam program perpustakaan digital lainnya.

Hartono (2019:51) menyatakan bahwa anggaran sebagai komponen dalam perpustakaan elektronik menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran menjadi sebuah prioritas penting untuk diperhitungkan dalam pembuatan perencanaan kebijakan di masa yang akan datang.

Begitu pula dengan indikator adanya kelengkapan fasilitas *e-pusda* belum maksimal dikarenakan tidak adanya fasilitas maupun fitur seperti

dark mode, e-newspaper, tesis, dan disertasi digital serta belum tersedia lengkap dalam berbagai format PDF, MP3 (musik) dan sebagainya.

Hartono (2019: 191) menyatakan bahwa sumber daya informasi digital yang sangat beragam termasuk *e-journal*, koleksi digital yang bersifat terbuka (*open access*), *e-books*, *e-newspapers*, tesis, dan disertasi digital dan aneka situs di internet serta tersedia dalam berbagai bentuk seperti PDF, JPEG atau TIFF (untuk gambar), MP3 (musik), dan video.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program *e-pusda* kurang berjalan optimal dengan dimensi sumber-sumber daya yang digunakan. Dimana seharusnya dalam mendukung berjalannya *e-pusda* dengan baik dan maksimal perlunya fasilitas serta fitur digital yang lengkap agar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan):

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Berdasarkan hasil penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Banjar tentang pelaksanaan *e-pusda* bahwa dalam pelaksanaan dimensi tersebut belum optimal, dikarenakan masih kurangnya bentuk *support* maupun uluran yang diberikan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota terlibat dalam pelaksanaan *e-pusda* untuk mengembangkan dan

mempromosikan *e-pusda* Kota Banjar di masa pandemi Covid-19.

Hartono (2019:31) menyatakan bahwa tujuan perpustakaan digital menjelaskan bahwa tujuan perpustakaan digital salah satunya adalah memperkuat komunikasi dan kolaborasi di antara riset, bisnis, pemerintahan dan komunitas pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program *e-pusda* kurang berjalan optimal dengan dimensi Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Dimana seharusnya dalam pelaksanaan program *e-pusda* perlu bekerja sama dan ikut berpartisipasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan dukungannya terhadap program aplikasi *e-pusda* Kota Banjar serta ikut terlibat dalam pengimplementasiannya sesuai dengan prosedur yang ada dikarenakan kurangnya komunikasi dan kerjasama dengan komunitas baca atau literasi serta masih belum ada dari pengguna *e-pusda* yang ikut berdonasi buku di aplikasi *e-pusda* sehingga menyebabkan pelaksanaan program layanan *e-pusda* belum dapat dilaksanakan secara optimal.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Berdasarkan hasil penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Banjar tentang pelaksanaan *e-pusda* bahwa dalam pelaksanaan dimensi tersebut indikator yang berkaitan yaitu partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan program *e-pusda* dikarenakan kurangnya komunikasi dan kerjasama dengan komunitas baca atau literasi serta masih belum ada dari pengguna *e-pusda* yang ikut berdonasi buku diaplikasi *e-pusda* sehingga menyebabkan pelaksanaan program layanan *e-pusda* belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Undang-undang Republik Indonesia No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 43 mengemukakan bahwa masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program *e-pusda* kurang berjalan optimal dengan dimensi Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dimana seharusnya dalam pelaksanaan program *e-pusda* diharapkan nantinya perlu mengkomunikasikan dengan komunitas baca yang ada di Kota Banjar serta ikut dalam memberikan masukannya terhadap aplikasi *e-pusda* tak lupa ikut dalam mensosialisasikan aplikasi *e-pusda* ke khalayak masyarakat.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Banjar tentang pelaksanaan *e-pusda* bahwa dalam pelaksanaan dimensi tersebut, diketahui indikator adanya tingkat kepatuhan pelaksana program *e-pusda* sudah terlaksana dengan baik, dikarenakan pelaksana program *e-*

pusda dalam melayani jam kerja disesuaikan dengan jam kerja pegawai perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar, selain itu pegawai sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam aturannya.

Hartono (2019 : 43) terkait dengan tingkat kepatuhan pelaksana program *e-pusda* dimana menyatakan bahwa dalam dunia perpustakaan khususnya perpustakaan digital, salah satunya seorang kepala perpustakaan sebagai aktor yang sangat berpengaruh dalam seluruh layanan perpustakaan digital, baik dari mulai mendefinisikan, mengoperasikan dan mengimplementasikannya.

Begitu pula dengan indikator adanya respon terhadap keinginan masyarakat belum maksimal dikarenakan masih kurangnya anggaran dalam mewujudkan keinginan dari masyarakat seperti permintaan buku digital dan saran dari masyarakat, serta mengatasi keluhan dari masyarakat sehingga respon terhadap keinginan masyarakat dalam mendukung layanan program aplikasi *e-pusda*.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dalam Pasal 16 ayat (4) mengemukakan bahwa perpustakaan kabupaten/kota harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program *e-pusda* kurang berjalan optimal dengan dimensi tingkat

kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Dimana seharusnya para pelaksana bisa merespon dengan cepat dan tepat terhadap keinginan masyarakat serta diharapkan ke depannya dapat memenuhi keinginan masyarakat secara cepat dan tepat agar masyarakat pun bisa puas terhadap layanan yang diberikan oleh para pelaksana *e-pusda* Kota Banjar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program layanan elektronik perpustakaan daerah di masa pandemi covid-19 oleh dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Banjar dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Pelaksanaan Program Layanan Elektronik Perpustakaan Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar secara umum kurang dilaksanakan sesuai dengan tingkat *implementability* keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik Sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program aplikasi *e-pusda* Kota Banjar, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perpustakaan daerah Kota Banjar kepada masyarakat walaupun sosialisasi masih dilakukan, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Adapun hal lain yang menghambat suatu keberhasilan pelaksanaan program *e-pusda* Kota Banjar antara lain kurangnya dukungan

dari pemerintah dan partisipasi dari kelompok masyarakat dalam menunjang keberhasilan program *e-pusda*, kurangnya pengembangan layanan dan kelengkapan fasilitas *e-pusda*, kurangnya dana anggaran baik dari pemerintah pusat ataupun daerah sehingga berpengaruh besar kepada kurangnya perkembangan layanan *e-pusda*, belum ada kejelasan target khusus pengguna *e-pusda* untuk derajat perubahan yang ingin dicapai, serta kemampuan dan keahlian sumber daya perpustakaan atau pegawai perpustakaan yang masih kurang baik sehingga inovasi dan kreatifitas pegawai juga sangat terbatas dalam mempromosikan *e-pusda* lewat cara lain di masa pandemi Covid-19. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan program *e-pusda* pada masa pandemi Covid-19 oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Banjar yang antara lain menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau perpustakaan daerah lain dalam menunjang keberhasilan program *e-pusda* serta mengadakan sosialisasi program layanan aplikasi *e-pusda* melalui sosial media seperti instagram, facebook, dan whatsapp selain turun langsung ke masyarakat karena kondisi pandemi Covid-19, membuat rencana anggaran khusus untuk program layanan *e-pusda* untuk merespon keinginan dari masyarakat dalam pengembangan layanan serta kelengkapan fasilitas *e-pusda* serta membuat rencana ke depan

yaitu target khusus pengguna *e-pusda* skala yang jelas dalam suatu pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Data Rekap Pengunjung Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2020
- Hartono. (2019). *Manajemen Perpustakaan Elektronik (E-Library) Konsep Dasar, Dinamika dan Sustainable di Era Digital*. [e-book]. Yogyakarta. Gava Media. Diakses 1 November 2020, dari Ipusnas
- Hartono. (2020). *Transformasi Perpustakaan Dalam Ekosistem Digital: Konsep Dasar, Organisasi Informasi, dan Literasi Digital*. Jakarta: Prenada Media
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- Peraturan Walikota Banjar Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- Vestikowati, Endah. (2015). *Pelaksanaan Pelayanan Perpustakaan Keliling Oleh Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis di Desa Panawangan Kecamatan Panawangan*. Jurnal Moderat. Vol.1.No.02. Universitas Galuh